

***Focus Group Discussion* Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara**

Tamrin Tamrin^{*1}, Taufiq Abdullah²

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

²Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Email Korespodensi: : tham.ibrahim@unkhair.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-08-2025

Disetujui 02-09-2025

Diterbitkan 04-09-2025

Kata kunci:

Focus Group Discussion,
Maluku Utara,
Pembangunan Berkelanjutan,
Pendekatan Berbasis Kawasan,
Perikanan Budidaya.

ABSTRAK

Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi, pengetahuan, dan masukan dari para pemangku kepentingan sektor perikanan. Proses FGD berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pembudidaya ikan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Diskusi berfokus pada isu-isu kunci seperti peningkatan produktivitas budidaya, mitigasi dampak lingkungan, pengelolaan kualitas air, penanganan penyakit ikan, diversifikasi komoditas, serta penguatan kelembagaan pembudidaya. Pendekatan berbasis kawasan dipilih agar pengelolaan budidaya perikanan dapat dilakukan secara terpadu, mempertimbangkan daya dukung ekosistem, ketersediaan sumber daya, serta kesesuaian ruang. Hasil FGD merumuskan rekomendasi kebijakan konkret, termasuk perlunya penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan riset terapan, serta integrasi program pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi aktif peserta memperkaya analisis dan memastikan rancangan kebijakan yang disusun selaras dengan kebutuhan lapangan. FGD ini tidak hanya menghasilkan dokumen rekomendasi, tetapi juga membangun sinergi lintas sektor untuk mendorong terciptanya sistem budidaya perikanan yang berkelanjutan, inklusif, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku Utara.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tamrin, & Taufiq Abdullah. (2025). Focus Group Discussion Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan Di Maluku Utara. Jurnal Ragam Pengabdian, 2(3), 488-495. <https://doi.org/10.62710/qfzf1p18>

PENDAHULUAN

Pembangunan perikanan budidaya menjadi salah satu pilar strategis penggerak ekonomi biru di Indonesia (Puspitasari et al., 2023; Musdalifah et al., 2024). Maluku Utara memiliki karakteristik unik sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 70% wilayah berupa perairan (Talib, 2025). Hal ini menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu pusat pengembangan perikanan budidaya di kawasan timur Indonesia. Potensi perikanan budidaya di wilayah ini mencakup komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti ikan kerapu, udang vaname, kekerangan, serta rumput laut (Aris & Tamrin, 2021; Tamrin et al., 2023; Taher et al., 2024; Rusdi et al., 2024; Tamrin & Abdullah, 2025a; Tamrin & Abdullah, 2025b). Tahun 2023 mencatat produksi perikanan budidaya Maluku Utara mencapai lebih dari 134,43 ribu ton dengan nilai tukar mencapai 575,42 juta Rupiah (KKP, 2025). Angka tersebut menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian daerah, sekaligus menegaskan pentingnya perencanaan pengembangan berbasis kawasan agar keberlanjutan produksi dapat terjaga.

Kondisi lapangan menunjukkan tantangan serius yang menghambat optimalisasi potensi budidaya. Tekanan terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat akibat aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak tanpa perencanaan, pencemaran limbah domestik, serta eksploitasi sumberdaya secara berlebihan (Tamrin et al., 2025). Permasalahan lain meliputi rendahnya adopsi teknologi budidaya ramah lingkungan, kualitas benih dan pakan yang belum konsisten, serta keterbatasan infrastruktur rantai dingin. Karakteristik masyarakat pembudidaya didominasi oleh skala usaha kecil dan tradisional yang masih bergantung pada pengetahuan turun-temurun, sehingga rentan terhadap kegagalan produksi dan fluktuasi harga pasar (Tamrin et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi terencana berbasis kawasan yang mampu mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Pembangunan dengan pendekatan berbasis kawasan untuk adalah alternatif mengatasi masalah tersebut. Sinergi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan pembangunan perikanan budidaya berbasis kawasan. Keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan kebijakan dan regulasi mendukung pengelolaan kawasan. Peran akademisi dan peneliti sangat dibutuhkan dalam menyediakan data ilmiah, teknologi inovatif, serta pelatihan teknis bagi pembudidaya. Pelaku usaha berperan dalam memperkuat rantai pasok, akses pasar, serta investasi infrastruktur. Masyarakat lokal sebagai pelaku utama perlu dilibatkan secara aktif melalui pemberdayaan dan pendampingan agar tercipta rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan kawasan budidaya yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan (Setiawan et al., 2023).

Focus Group Discussion (FGD) dipandang sebagai wadah efektif untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (Sulistiari et al., 2024). Forum ini memberi ruang bagi pertukaran gagasan, identifikasi masalah secara partisipatif, serta penyusunan solusi berbasis konsensus. Aktivitas FGD diharapkan menghasilkan peta jalan pengembangan kawasan budidaya, strategi mitigasi dampak lingkungan, serta rekomendasi teknologi tepat guna sesuai karakteristik ekosistem pesisir Maluku Utara. Hasil FGD akan menjadi dokumen rujukan yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana strategis daerah dan program pembangunan daerah (Prayitno et al., 2023).

Tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan perikanan budidaya berbasis kawasan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat pembudidaya, serta memperkuat jejaring kemitraan antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. Dampak yang diharapkan mencakup peningkatan produktivitas budidaya secara berkelanjutan, pengurangan beban pencemaran lingkungan,

serta peningkatan kesejahteraan kelompok pembudiaya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan FGD Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Persiapan kegiatan meliputi penentuan tema utama, penyusunan agenda, serta pemilihan narasumber berkompeten. Narasumber berasal dari Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPRD Provinsi Maluku Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, akademisi bidang akuakultur, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Keterlibatan narasumber dari berbagai unsur memastikan pandangan yang disampaikan bersifat komprehensif. Peserta berasal dari DKP Kabupaten/Kota di Maluku Utara, akademisi, praktisi budidaya, kelompok pembudidaya, serta mahasiswa. Sesi FGD dimulai dengan pemaparan narasumber mengenai kondisi perikanan budidaya dan isu-isu strategis keberlanjutan. Pemaparan berfungsi sebagai pemicu diskusi dan penyamaan persepsi mengenai permasalahan utama. Tahapan berikutnya berupa diskusi terbuka yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman lapangan, dan masukan terhadap materi yang telah dipaparkan. Masukan peserta menjadi bahan penting untuk merumuskan rekomendasi strategis. Rekomendasi disusun secara bersama oleh narasumber, fasilitator, dan peserta melalui proses klarifikasi dan penyepakatan pada akhir forum. Dokumen akhir berupa notulensi, foto, dan ringkasan rekomendasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana tindak lanjut pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan berbasis kawasan di Maluku Utara.



Gambar 1. Tahapan FGD Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara berhasil menghimpun masukan strategis dari pemangku kepentingan lintas sektor. Partisipasi aktif terlihat dari keterlibatan perwakilan DPRD Provinsi, BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, akademisi, praktisi budidaya, kelompok pembudidaya, serta mahasiswa. Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pembuat kebijakan dengan pelaku lapangan sehingga permasalahan teknis dan kebijakan dapat dianalisis secara simultan. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya masukan yang bersifat solutif dan berbasis pengalaman lapangan, khususnya terkait tantangan pengembangan kawasan, kapasitas SDM, dan dukungan kebijakan daerah.

Pemaparan narasumber memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perikanan budidaya di Maluku Utara, termasuk potensi komoditas unggulan udang, kakap putih, bandeng, dan rumput laut), kendala produktivitas, serta peluang integrasi dengan kebijakan tata ruang pesisir. Peserta kemudian

merespons dengan mengajukan usulan perbaikan yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi, peningkatan daya saing, dan keterlibatan komunitas lokal. Pendekatan berbasis kawasan menjadi topik utama diskusi karena dinilai efektif dalam mengoptimalkan potensi wilayah sekaligus mengatasi fragmentasi program antar-kabupaten. Temuan ini sejalan dengan konsep pengelolaan berbasis kawasan yang menekankan integrasi dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi (Hafsaridewi et al., 2019; Lase & Hulu, 2024).

Hasil FGD menghasilkan enam rekomendasi strategis yang disepakati bersama. Pertama, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya Maluku Utara secara rutin sebagai forum konsolidasi lintas sektor dan lintas wilayah, dengan lokasi prioritas di daerah sentra budidaya seperti Halmahera Barat atau Halmahera Utara. Kedua, penerapan pendekatan berbasis kawasan melalui penetapan zona budidaya unggulan, integrasi dengan RTRW, serta penguatan sistem klaster berbasis wilayah pesisir dan perairan darat. Ketiga, penguatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan CBIB, pembentukan koperasi/kelompok usaha bersama, serta fasilitasi akses pembiayaan dan asuransi.

Keempat, sinergi riset, inovasi, dan teknologi yang menekankan pemanfaatan hasil kajian akademik dan penerapan teknologi budidaya berkelanjutan, termasuk pembangunan pusat data digital. Kelima, dukungan legislasi dan anggaran daerah, berupa dorongan DPRD untuk mengalokasikan anggaran sektor budidaya dan menyusun regulasi daerah yang memperkuat arah pembangunan perikanan berbasis kawasan. Keenam, kemitraan multipihak dan kolaborasi berkelanjutan, yang mencakup keterlibatan pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat sipil, menjadikan FGD sebagai agenda evaluasi tahunan, serta menjadikan kampus sebagai pusat pengembangan inovasi akuakultur lokal.

Secara keseluruhan, FGD ini berperan sebagai forum konsolidasi kebijakan, transfer pengetahuan, dan penguatan sinergi multipihak. Proses diskusi yang partisipatif memperkuat rasa kepemilikan (sense of ownership) peserta terhadap agenda pembangunan perikanan budidaya. Rekomendasi yang dihasilkan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional karena mencakup lokasi prioritas, mekanisme koordinasi, dan skema pembiayaan. Hal ini mendukung terwujudnya model pengelolaan perikanan budidaya yang inklusif, berbasis kawasan, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan di mata pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat hasil studi yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan keberlanjutan sumberdaya (Kaseng, 2023; Daaris & Marwah, 2024; Lolkary & Laurens, 2024).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan FGD.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan berbasis kawasan berhasil mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga kelompok pembudidaya. Forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data lapangan dan pengalaman praktis, sehingga lebih relevan serta aplikatif. Diskusi interaktif mendorong lahirnya strategi pengelolaan kawasan budidaya yang memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan

ekonomi. Kesepakatan yang dihasilkan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mendorong tata kelola budidaya yang berkelanjutan. Partisipasi aktif peserta memastikan setiap rekomendasi mencerminkan aspirasi masyarakat pesisir. Model FGD ini dapat dijadikan contoh penerapan perencanaan partisipatif untuk mendorong pengelolaan perikanan budidaya yang inklusif, adaptif terhadap tantangan lingkungan, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, Malut Post serta perwakilan kelompok pembudidaya yang telah berpartisipasi aktif. Apresiasi juga diberikan kepada para narasumber, fasilitator, dan media lokal atas dukungan dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Kolaborasi seluruh pihak memungkinkan tersusunnya rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut yang berorientasi pada pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan berbasis kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M., & Tamrin, T. (2021). Analogi Karakteristik Perairan Pada Kegiatan Pengembangan Budidaya *Kappaphycus alvarezii* Di Pulau Limbo, Taliabu, Maluku Utara. *TECHNO-FISH*, 5(1).15-23.
- Daaris, Y. Y., & Marwah, M. (2024). Sinergi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 14-28.
- Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., & Adimu, H. E. (2019). Pendekatan sistem sosial–ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(2), 61-74.
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42-52.
- KKP. (2025). Statistik KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-dinamis>
- Lase, B. R., & Hulu, F. (2024). Model Pengelolaan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Nias. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(6).
- Lolkary, S. Y., & Laurens, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Perspektif Collaborative Governance. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14327-14333.
- Musdalifah, N. A., Darwis, D., & Nugraha, I. F. (2024). Strategi Indonesia dalam Mencapai Blue Economy Roadmap Melalui National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). *Student Scientific Creativity Journal*, 2(6), 53-65.
- Prayitno, G., Wahyuni, S., Iyati, W., Tarno, H., Hayat, A., Fauziah, S. H., & Hasna, F. (2024). Pendampingan Penyusunan Desain Museum Desa Pertanian Karangpatihan: Integrasi Wisata

- Edukatif dan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 287-302.
- Puspitasari, D., Chasanah, A. N., & Wardhani, M. F. (2023). Strategi peningkatan ketahanan ekonomi untuk perikanan berkelanjutan berbasis konsep blue economy. *Jurnal Praktik Akuntansi Modern*, 5(4).
- Rusdi, R., Wahidin, N., Aris, M., & Abdullah, T. (2024). Land Suitability Analysis For Brackishwater Aquaculture Development In In Morotai Island District. *Jurnal Ilmiah Platax*, 12(2), 74-85.
- Setiawan, D. B., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Collaborative Government Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Operasi dan kewirausahaan*, 14(7), 817-823.
- Sulistiarni, E. B., Prihandini, R., Alfian, R., Shofiah, W., & Laili, H. (2024). Strategi Pembentukan Eduwisata Pertanian Ramah Lingkungan melalui Focus Group Discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4465-4472.
- Taher, M. N., Aris, M., Wahidin, N., & Abdullah, T. (2024). Analisis Kesesuaian Kawasan untuk Pengembangan Marikultur di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Akuatiklestari*, 8(1), 110-119.
- Talib, A. (2025). *Bagian Lima: Penguatan Kapasitas Sumberdaya Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara. Dalam H. Oesman (Ed.), Transformasi pembangunan & kearifan lokal: Bunga rampai* (hlm. 72–99). K-Media.
- Tamrin, T., & Abdullah, T. (2025a). Site Suitability Assessment for Shellfish Bottom Culture in Maitara Coastal Area. *Jurnal Ilmiah Platax*, 13(1), 205-212.
- Tamrin, T., & Abdullah, T. (2025b). Land Suitability Evaluation for Pacific White Shrimp Aquaculture Development in West Halmahera, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 29(4), 4657-4672.
- Tamrin, T., Abdullah, T., & Aris, M. (2023). Pengembangan Budidaya Udang Vaname (*Penaeus vannamei*) Berdasarkan Kualitas Air Di Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. *Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia*, 11(1), 64-73.
- Tamrin, T., Schadu, J. N. W., Wantasen, A. S., Sambali, H., & Abdullah, T. (2025). Rapid appraisal of brackishwater aquaculture (Rap-BWAC) for assessing sustainable development of brackishwater aquaculture in coastal areas. *Ocean & Coastal Management*, 269, 107822.